



Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon

Sheila Sabina Putri Defa¹, Titi Stiawati², Sierfi Rahayu³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Email : 6661200164@untirta.ac.id titi.stiawati@untirta.ac.id sierfirahayu@untirta.ac.id

Abstract This research was motivated by the low Gross Higher Education Participation Rate (APKPT) and low Labor Force Participation in Cilegon City. The government has issued a Higher Education Scholarship Program, namely a Full Undergraduate Scholarship so that the people of Cilegon City can meet the minimum industrial needs in Cilegon City. The aim of this research is to find out whether the implementation process for the Full Undergraduate Scholarship program is optimal, in terms of several problems related to the annual target of scholarship recipients not having reached the target, lack of socialization, incompatibility with scholarship registration requirements, and the flow of registration for full undergraduate scholarship candidates. This study uses a qualitative method. Data was collected by interviews with 15 informants consisting of implementing agents, scholarship recipients and the community. Data were reduced according to the theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975) with 6 aspects, namely; (1) policy size and objectives; (2) resources; (3) characteristics of implementing agents; (4) the attitude or tendency of the implementer; (5) communication between organizations; (6) Economic, Social and Political Environment. The results of the research show that there is a misunderstanding of communication between organizations and the community which causes a lack of information regarding full undergraduate scholarships, the education office only sets a Certificate of Incompetence as a requirement, and all prospective recipients register in the same way, namely through the Sicerdas application, but in the first year it is not use the Sicerdas application for scholarship registration.

Keywords: College, Implementation, Program, Scholarship

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi Kasar (APKPT) dan rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Cilegon. Pemerintah telah mengeluarkan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi yaitu Beasiswa Penuh Sarjana agar masyarakat Kota Cilegon dapat memenuhi kebutuhan minimal industri di Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan program Beasiswa Penuh Sarjana sudah optimal, ditinjau dari beberapa permasalahan terkait target penerima beasiswa per tahun belum mencapai target, kurangnya sosialisasi, ketidaksesuaian dengan syarat pendaftaran beasiswa, dan alur pendaftaran calon penerima beasiswa penuh sarjana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada 15 orang informan yang terdiri dari pelaksana program, penerima beasiswa dan masyarakat. Data direduksi menurut teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dengan 6 aspek yaitu; (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik pelaksana program; (4) sikap atau kecenderungan pelaksana program; (5) Komunikasi antar organisasi; (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahpahaman komunikasi antara organisasi dengan masyarakat yang menyebabkan kurangnya informasi terkait beasiswa penuh S1, dinas pendidikan hanya menetapkan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagai persyaratan, dan semua calon penerima mendaftar dengan cara yang sama yaitu melalui aplikasi Sicerdas, namun pada tahun pertama tidak menggunakan aplikasi Sicerdas untuk pendaftaran beasiswa.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Pelaksanaan, Program, Beasiswa

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan jurnal ilmiah studi ekonomi dan kebijakan publik menyatakan bahwa ketika Pendidikan tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Yang mana Pendidikan sangat efektif untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kualitas sumber daya manusia yang baik akan mendorong kualitas ekonomi (Ali Hardana, 2023:7-19). Penegasan bahwa antara Pendidikan dan sistem ekonomi memiliki hubungan dua arah atau kausalitas. Dalam masyarakat yang mempunyai taraf hidup ekonomi yang baik, potensi

pengembangan Pendidikan lebih besar karena orang-orang telah lebih siap dan lebih banyak dana yang tersedia. Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan merupakan komponen utama dari operasional status kelas sosial atau status sosio ekonomi dan bahwa terdapat suatu korelasi tinggi antara mereka (Miflen, 1986:242). Menurut Deputy Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama pada tahun 2021, dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa hanya 1,8 juta anak dari 3,7 juta lulusan yang diserap oleh perguruan tinggi. Yang mana pada jumlah ini terdapat kurang lebih 1,9 juta anak yang belum bisa merasakan bangku kuliah. Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Banten pada tahun 2019 sebesar 33,22%, lalu pada tahun 2020 menurun menjadi 33,07% saja. Hal ini menjadi masalah yang cukup urgensi bagi Pendidikan di Banten. Pada tahun 2021 APKPT Banten menurun drastis menjadi 32,51 yang mana angka tersebut belum bisa lebih tinggi daripada tahun 2020.

Tingginya Angka Partisipasi Kasar merupakan indikasi bahwa tingkat partisipasi Pendidikan tinggi cukup besar. Kualitas Pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang erat. Keduanya mendukung gagasan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan persentase angka partisipasi perguruan tinggi di Banten pada tahun 2021, menunjukkan bahwa mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi menurun. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang dapat melanjutkan Pendidikan tinggi karena masalah ekonomi. Selain itu peningkatan akses informasi dan sumber pendanaan terbatas (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017).

Tingkat Partisipasi perguruan tinggi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Kota Cilegon. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja di industri-industri di Kota Cilegon yang mayoritas menerima tenaga kerja dengan kualifikasi minimal strata 1. Kota Cilegon merupakan kota dengan perkembangan industri yang sangat pesat. Industri di Kota Cilegon merupakan industri padat modal dengan risiko yang tinggi dalam penerapan teknologi dan pengoperasian. Maka dari itu, industri di Kota Cilegon lebih menekankan untuk merekrut tenaga kerja dengan Pendidikan yang lebih tinggi dengan kualifikasi minimal strata satu atau S1. Dikutip dari Radar Banten, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Daerah Pemilihan Kota Cilegon menyatakan bahwa penyebab lulusan SMA dan SMK tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Berdasarkan pernyataannya, banyak lulusan SMA dan SMK yang tidak terserap kedalam insdustri di Kota Cilegon. Maka dari itu

pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan Kebijakan Program Kartu Cilegon Sejahtera yaitu Program Beasiswa Full Sarjana S1.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terdapat beberapa masalah pertama, kurangnya sosialisasi program beasiswa Sarjana S1 yang menyebabkan program beasiswa ini terealisasi hanya pada 523 penerima. Sisa kuota target pada tahun 2021 dialokasikan pada tahun 2022 dan seterusnya jika target pertahun belum terpenuhi. Selain itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan pemahaman masyarakat terkait informasi kebijakan yang minim. berdasarkan wawancara terhadap salah satu penerima beasiswa sarjana S1 bahwa penerima tersebut bahkan tidak mengetahui bahwa beasiswa full sarjana merupakan salah satu program dari Kartu Cilegon Sejahtera. Dapat dilihat dari rencana kerja sosialisasi beasiswa sarjana S1 untuk 5 tahun kedepan. Informasi beasiswa full sarjana belum disosialisasikan di seluruh SMA dan SMK di Kota Cilegon. Berdasarkan staff dinas Pendidikan bagian Pendidikan formal dan nonformal, hal ini disebabkan karena banyak sekolah yang menolak tawaran sosialisasi karena dapat mengganggu proses belajar mengajar. Terdapat 22 SMA (Sekolah Menengah Atas) dan 26 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Cilegon, namun selama 3 tahun berjalannya program beasiswa Sarjana S1, baru 12 sekolah yang didatangi oleh dinas Pendidikan untuk sosialisasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi secara administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam keseharian birokrasi pemerintahan. Sementara itu secara politik adalah implementasi yang perlu dilaksanakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Eugene Bardach dalam bukunya *"The Implementation Game"*, bahwa sulit dalam membentuk program dan kebijakan umum yang terlihat baik diatas kertas. Lebih sulit merumuskannya kedalam kata-kata yang indah didengar bagi para otoritas public dan para pemilihnya. Lebih sulit lagi untuk mengimplementasikan nya dan cara membuat puas semua orang termasuk mereka yang dianggap klien.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino "Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)" (2017:133), model yang dikenal dengan *"A Model of The Policy Implementation"*. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana

4. Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Meter & Van Horn bahwa kinerja kebijakan publik dapat diukur keberhasilannya dengan dihubungkan dengan berbagai variabel. Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi ini merupakan sebuah struktur kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang berlangsung dalam hubungan beberapa variabel dan telah dipetakan beberapa variabel implementasi yang memudahkan penelitian untuk mengetahui potret keberlangsungan implementasi kebijakan yang berjalan secara linear dari Keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan politik. Dalam penelitian ini, peneliti memakai pendekatan Top-down, Karena perspektif dari pendekatan Top-down yaitu fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Pendekatan ini bersifat dari atas kebawah. Pendekatan ini dibangun oleh generasi 1980-an yang mana mereka telah menggunakan hipotesis mengenai model implementasi yang ideal serta mengujinya dengan data empiris dari lapangan.

Berdasarkan studi implementasi interpretasi Barrett (2004) yang menggunakan pendekatan Top-down yang mana tujuan utamanya ialah *“to identify the cause of implementation problems to failure and suggest ways of enhancing the likelihood of obtaining compliance with policy objectives, generally focused on strategies for improved communication of intention, coordination of the ‘links in the chain’ management of resources and control implementing agents”*. Berdasarkan statement tersebut, menjelaskan bahawa studi implementasi generasi 1980-an cenderung menjabarkan hambatan atau kegagalan terkait implementasi suatu kebijakan atas dasar faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut gagal. Fokus awal Top-down ialah kebijakan pemerintah. Fokus keseluruhannya ialah bagaimana mekanisme implementasi bekerja dalam mencapai tujuan kebijakan. Identifikasi aktor utama yang terlibat dalam prosesnya dari pusat dilanjut kebawha sebagai konsekuensi sebuah implementasi. Kriteria evaluasi pendekatan Top-down berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan. Cara melaksanakan pendekatan ini ialah dimulai dari memahami kebijakan dan melihat efektivitas pencapaian tujuan tersebut di lapangan. Cara ini disbut juga dengan command and control yang diartikan sebagai memberikan komando dan mengawasi pelaksanaannya.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data meneges pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kondisi yang sekarang. Metode deskriptif ditujukan untuk memanu penelitian dalam mengeksplorasi potret situasi sosial berdasarkan fakta secara menyeluruh. Tujuannya agar penelitian ini memiliki gambaran sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat. Format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas kondisi berbagai situasi, ataupun variabel yang timbul di masyarakat yang menajdi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi (burgin, 2009). Penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi program Beasiswa Sarjana S1 Kartu Cilegon Sejahtera.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan, mengacu pada parameter atau aspek yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan publik. Efektivitas kebijakan mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujun yang telah ditetapkan. Aspek efektivitas berupa pencapaian target atau perubahan masalah yang dihadapi maupun tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu untuk mengukur efisiensi sumberdaya yang terlibat dengan pertimbangan terhadap alternatif yang mungkin lebih hemat penggunaan. Ukuran kebijakan penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak menghasilkan ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Tentu dengan berbagai pertimbangan dan bagaimana dampak yang dihasilkan kepada masyarakat.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan beasiswa full Sarjana S1 belum optimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan berjalannya kebijakan dari tahun 2021 hingga sekarang. namun, untuk tolak ukur kebijakan dalam aspek target penerima untuk 3 tahun ini belum mencapai 3000 mahasiswa. Para agen pelaksana mengharapkan pendaftaran tahun ini lebih banyak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa full Sarjana S1. Dengan begitu, akan semakin tinggi harapan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi dan Partisipasi Kerja di Kota Cilegon.

Kemudian pada aspek Sumber daya, Pada kebijakan Beasiswa Full Sarjana S1, Sumber Daya Manusia di Dinas pendidikan Kota Cilegon sebagai implementor utama kebijakan sudah baik dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap anggota tim beasiswa di Dinas pendidikan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Terdapat 8 (delapan) anggota dalam tim beasiswa full Sarjana S1 Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Berdasarkan

pernyataan dari Kepala Bidang Pendidikan Nonformal bahwa kuantitas dan kualitas tim beasiswa full Sarjana S1 Dinas Pendidikan Kota Cilegon sudah mumpuni dan tercukupi. Semua anggota yang bertugas di tim beasiswa sudah memenuhi standar kualifikasi untuk ikut serta memegang kebijakan.

Selanjutnya Sumber daya Anggaran pada kebijakan beasiswa sarjana ini sudah dialokasikan dengan baik. Pengendalian dan pengelolaan anggaran di kelola oleh Mitra yaitu Bank BJB dan Dinas Pendidikan dapat mengakses pengelolaan tersebut. Berdasarkan pernyataan dari informan dari Dinas Pendidikan bahwa penyediaan dana sudah baik dan tidak kurang selama pelaksanaan karena sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja tertulis yaitu maksimal Rp 3.000.000 per semester dan akan dicairkan tergantung dengan besaran UKT yang didapatkan. Berdasarkan pernyataan dari Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bahwa untuk penerima beasiswa full Sarjana S1 yang kurang mampu mayoritas mendapatkan Uang Kuliah Tunggal dibawah Rp 3.000.000 rupiah, namun ada beberapa prodi yang mencapai Rp 3.000.000 atau lebih dan kelebihan tersebut ditanggung masing-masing penerima.

Kemudian Aspek Karakteristik agen pelaksana, Karakteristik dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam kebijakan beasiswa full sarjana S1 di kota Cilegon sudah sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksinya masing-masing. Disamping itu, pengawasan dan evaluasi juga di naungi langsung oleh Pemerintah Daerah dan Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Cilegon sebagai eksekutor utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari Dinas Pendidikan bahwa pengawasan pelaksanaan beasiswa full sarjana S1 dititipkan dari Pemerintah Daerah kepada Dinas Pendidikan terkait pengawasan dan pengelolaan Anggaran, namun tetap ada pengawasan lebih lanjut dan evaluasi dari Pemerintah Daerah.

Pada aspek Sikap atau Kecenderungan pelaksana, Sikap para agen pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Cilegon sudah baik. Selain itu tim beasiswa full sarjana S1 juga memiliki pemahaman mengenai pentingnya suatu kebijakan yang mereka jalankan dan tentunya hal ini menjadi nilai atau fokus utama sebelum mereka menjalankan tugas dari pemerintah daerah. Berdasarkan analisis penulis mengenai sikap para agen pelaksana kebijakan ini adalah tim beasiswa memberikan respon positif dan profesionalitas kerja untuk mendukung berjalannya beasiswa full sarjana S1.

Selanjutnya aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, berdasarkan wawancara dengan Informan, bahwa sempat ada miskomunikasi dari sosialisasi yang dilakukan di tingkat RT. Yang membuat banyak orang tua datang ke Dinas Pendidikan saat pendaftaran beasiswa belum dibuka. Hal ini sudah diluruskan kembali oleh Dinas

Pendidikan sehingga tidak ada lagi kesalahan penyampaian kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan dan pihak universitas berkomunikasi melalui Grup Whatsapp sehingga memudahkan calon penerima beasiswa untuk menerima informasi lebih lanjut jika belum paham terkait informasi yang diberikan.

Terakhir, aspek Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Masyarakat merespon positif adanya beasiswa full sarjana S1. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, menyatakan bahwa mereka sangat mengapresiasi dan mendukung penuh beasiswa full sarjana S1 di Kota Cilegon. Akan lebih bagus lagi jika program ini di ikuti oleh Pemerintahan Provinsi Banten, akan lebih banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk lanjut ke Perguruan Tinggi.

5. CONCLUSION

Program Kartu Cilegon Sejahtera Studi Kasus Beasiswa Pendidikan Sarjana S1 sudah berjalan dengan optimal, akan tetapi masih terdapat hal yang perlu dibenahi pada beberapa aspek. Dari keenam aspek menurut Van Metter Van Horn (Agustino, 2020:151), 4(empat) diantaranya yaitu Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik sudah optimal. Dan 2(dua) lainnya yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan dan Komunkasi Antar Organisasi belum berjalan dengan optimal karena belum tercapainya target sasaran penerima dan komunikasi yang masih perlu dibenahi. Pertama, pada aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan belum bisa dikatakan optimal, hal ini disebabkan oleh tolak ukur kebijakan yang belum terpenuhi pada tahun 2023 yaitu jumlah penerima beasiswa belum mencapai target yang ditentukan. Kedua, pada aspek Sumber daya sudah cukup optimal dikarenakan sumberdaya manusia pada program beasiswa full sarjana, yaitu tim beasiswa dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon memiliki kuantitas dan kualitas yang cukup. Begitupula dengan sumberdaya anggaran sudah teranggarkan dengan baik dan tidak ada kendala mengenai pembiayaan. Ketiga, Aspek Karakteristik Agen Pelaksana dapat dikatakan sudah optimal, karena karakter tim beasiswa dan agen pelaksana dari pihak MoU sudah menjalankan program beasiswa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan pelaksanaan program diawasi oleh pemerintah Kota untuk laporan evaluasi pertahunnya. Keempat, Aspek Sikap/Kecenderungan para pelaksana sudah optimal, hal ini dapat dibuktikan dari berjalannya program beasiswa full sarjana s1 hingga sekarang. para pelaksana melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan professional dan paham mengenai program beasiswa full sarjana S1. Kelima, Aspek Komunikasi Antar Organisasi belum bisa dikatakan optimal, hal ini dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman informasi antar RT/RW dalam penyampaian

informasi kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang kurang paham mengenai informasi beasiswa full sarjana S1. Keenam, Aspek Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik sudah optimal dikarenakan seluruh elemen masyarakat dan elite politik mendukung program ini dengan baik karena sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilegon.

6. REFERENCES

- Admin Berita Kota Cilegon. (2022, Februari 10). Pemkot Cilegon tambah kerja sama beasiswa full sarjana di 8 perguruan tinggi. Diakses 11 Juni 2024, dari <https://berita.cilegon.go.id/baca/-Pekot-Cilegon-Tambah-Kerja-Sama-Beasiswa-Full-Sarjana-di-8-Perguruan-Tinggi/20230807/NjkwOA%3D%3D>
- Aulia, D. D. (2023, Agustus 4). Walkot Cilegon genjot peningkatan kualitas SDM lewat beasiswa sarjana. Diakses 11 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6859665/walkot-cilegon-genjot-peningkatan-kualitas-sdm-lewat-beasiswa-sarjana>
- Becker, W. E., & Lewis, D. R. (1993). Higher education and economic growth. Springer Netherlands.
- Daniar Paramita, R. W., et al. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Press WidyaGama.
- Dunn, W. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Elfarabi, M. F. (2018). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia.
- Fitri, D. D. (2017). Peran pemerintah daerah dalam sektor pendidikan: Bantuan beasiswa terhadap masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2016. *Vol. 4:14*.
- Frayudha, A. D. (n.d.). *Konsep perencanaan kebijakan, tahapan dan siklus pemetaan*.
- Hafni Sahir, & Syafrida. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia, Universitas Medan Area.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hardana, A. (2023). Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)*, 2(1), 7-19.
- Harlis, F. P., Muhyi, H. A., & Alexandri, M. B. (2019). Implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten Sumedang). *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 117-131.
- Hayati, S. (2022, Desember 26). Ribuan masyarakat Cilegon nikmati bantuan beasiswa full sarjana dari Pemkot Cilegon. Diakses 12 Juni 2024, dari <https://banten.antaranews.com/berita/235119/ribuan-masyarakat-cilegon-nikmati->

bantuan-beasiswa-full-sarjana-dari-pemkot-cilegon

- Kasmad, R. (2013). *Studi implementasi kebijakan publik. Jurnal Kedai Aksara*.
- Kusuma Dewi, D. S. (2022). *Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.
- Makhasin, A. (2023). Implementasi program beasiswa satu rumah satu sarjana dalam upaya perlindungan sosial di Desa Panggungharjo Sewon Bantul. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 1-19.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Mufidah, N. H., & Tauran, T. (2024). Implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk meningkatkan pembelajaran digital tingkat sekolah dasar negeri di Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. *Publika*, 172-181.
- Nuryanuarifa, D., Maharani, W. M., & Lailin, U. R. (2024). Implementasi kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan: Studi pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 37-48.
- Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Program Kartu Cilegon Sejahtera.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Redaksi. (2021, Juni 24). Bahas beasiswa full sarjana dalam KCS Dindik Cilegon sebut masih perlu kaji aturan. Diakses 11 Juni 2024, dari https://selatsunda.com/bahas-beasiswa-full-sarjana-dalam-kcs-dindik-cilegon-sebut-masih-perlu-kaji-aturan/#google_vignette
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Seran, S. (2017). Hubungan antara pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10, 59-71.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Tajudin, A. (2023, Agustus 17). Pemkot Cilegon alokasikan Rp 120 miliar bagi 5.000 mahasiswa, gratis kuliah hingga 8 semester. Diakses 11 Juni 2024, dari <https://banten.tribunnews.com/2023/08/17/pemkot-cilegon-alokasikan-rp-120-miliar-bagi-5000-mahasiswa-gratis-kuliah-hingga-8-semester>
- Tasyak, U. (2022). Implementasi kebijakan program beasiswa satu rumah satu sarjana dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pongkok Kabupaten Klaten. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 73-85.
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 1-12.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Zanata, I., Basori, Y. F., & Mulyadi, A. (2023). Implementasi program kartu cerdas dalam upaya mengurangi siswa rawan putus sekolah pada jenjang sekolah dasar di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 501-508.